



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK  
PANJA PERGURUAN TINGGI  
KOMISI X DPR RI  
KE KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR  
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022-2023  
30 SEPTEMBER S.D. 2 OKTOBER 2022**

**I. PENDAHULUAN**

Panitia Kerja (Panja) Perguruan Tinggi Komisi X DPR-RI sebagai mitra Kemendikbudristek RI, sebagaimana keputusan Rapat Intern Panja pada 22 Agustus 2022, akan melakukan kunjungan spesifik bidang Perguruan Tinggi ini ke Banten (Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang), Jawa Tengah (Universitas Dian Nuswantoro Semarang), Jawa Timur (Universitas Merdeka Malang).

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 98 ayat (3) huruf a dan huruf d;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tentang Pembentukan Panja Perguruan Tinggi Swasta pada 6 Juli 2022.
12. Rapat Intern Panja Panja Perguruan Tinggi Swasta pada 22 Agustus 2022.

**B. Tujuan**

Melaksanakan fungsi Komisi X DPR RI di bidang pengawasan pelaksanaan pendidikan tinggi, terutama dalam mencapai tujuan menyiapkan SDM yang berpengetahuan dan trampil, berkarakter, bermoral dan bermental kuat, peduli serta bertanggungjawab.

### C. Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Provinsi Jawa Timur pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 terdiri dari Anggota Komisi X DPR RI, Sekretariat Komisi X DPR RI, Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, Bagian TVR Parlemen, serta Bagian Media Cetak dan Media Sosial Sekretariat Jenderal DPR RI. Tim dipimpin oleh **Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si.** dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI. Kunjungan kerja ini juga didampingi oleh mitra kerja Komisi X dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, yaitu **Prof. Dr. Ir. M. Faiz Syuaib, M.Agr.** selaku Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan **Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan, S.E., M.A.** selaku Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi.

### D. Jadwal Kunjungan Kerja

Pertemuan para rektor dan pemimpin Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri, yaitu:

- a. Prof. Dr. Anwar Sanusi, S.E., M.Si. Rektor Universitas Merdeka Malang.
- b. Prof. Dr. Dyah Sawitri, Ketua LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur
- c. Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D. Med. Sc, Rektor Universitas Brawijaya
- d. Prof. Dr H Maskuri, M.Si., Rektor Universitas Islam Malang (Unisma)
- e. Pembantu Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
- f. Prof. Dr. Dyah Sawitri, Rektor Universitas Gajayana Malang (Uniga)
- g. Pembantu Direktur Politeknik Negeri Malang
- h. Dr. Munawaroh, M.Kes, Direktur STKIP PGRI Jombang

## II. TEMUAN PERMASALAHAN

Dalam diskusi bersama para rektor dan pemimpin PTS dan PTN yang hadir di Universitas Merdeka Malang, terdapat beberapa hal yang menjadi masukan penting, antara lain sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. Anwar Sanusi, S.E., M.Si. Rektor Universitas Merdeka Malang,** menyampaikan beberapa masukan antara lain:
  - a. Kondisi PTS sebenarnya tergantung kepada peran pemerintah sebagai mitra bagi PTS dalam mengemban fungsi menyelenggarakan pendidikan tinggi. Mengingat jumlah perguruan tinggi 3.115 PT, dimana 2.990 PTS sisanya 125 PTN, seharusnya pemerintah memberi perhatian lebih pada PTS agar secara bertahap mampu hidup berdampingan dengan PTN. Contoh misalnya, perlakuan akreditasi di banyak kejadian, program studi di PTS akreditasinya turun dari B ke C. Ini benar-benar memukul telak program studi. Prodi tersebut tidak laku dan tidak ada peminat akhirnya tutup. Bagaimana SDM yang terpaksa kehilangan pekerjaannya, bagaimana mereka yang sudah dapat tersertifikasi. Seharusnya pemerintah hadir untuk melakukan pembinaan dengan cara bijak. Misal, kalau ada indikasi akreditasi akan turun, maka jangan langsung dinilai, melainkan diberi waktu 1 tahun untuk memperbaiki data dengan tetap memberlakukan akreditasi awal. Misalnya lagi, dalam mencapai Indikator Utama Perguruan Tinggi sama antara PTN dan PTS, kebijakan yang diterima PTS kurang memadai karena SKIM 2 yang disediakan pemerintah kompetisinya sangat ketat.

- b. Sebagai mitra, kehadiran pemerintah sangat didambakan PTS untuk membuat dan mengontrol regulasi yang adil. Jangan membiarkan PTN melakukan penerimaan mahasiswa secara mandiri dan berlebihan. Sistem penerimaan mandiri yang berlebihan, tentu akan menyedot calon mahasiswa yang pintar dan dari sisi finansial berkecukupan. PTS akan mengelola mahasiswa yang pas-pasan dalam segala hal.
- c. Tantangan yang dihadapi PTS sebenarnya jauh lebih berat, karena di satu sisi ingin menyelenggarakan proses pendidikan yang lebih baik, tetapi di sisi lain juga tersandung dengan regulasi yang kurang menguntungkan. Pola pembinaan yang dilakukan pemerintah kepada PTS selama ini melalui Bindalwas (pembinaan, pengendalian dan pengawasan). Proses ini sifatnya pengacakan pemenuhan syarat teknis administratif. Perolehan hibah, juga merupakan bagian dari pembinaan yang diterima PTS, namun jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah dosen yang dimiliki dan tuntutan kualitas yang harus disediakan PTS.
- d. Inovasi dalam berbagai bidang di PTS juga menjadi agenda penting. Namun terdapat kendala dalam mengembangkan inovasi, dan jumlah insentif dan hibah yang diberikan, masih terbatas. Kendala lain yang dihadapi oleh PTS dalam mengembangkan inovasi adalah terbatasnya kapasitas dan dukungan PTS. Dukungan dari pemerintah belum signifikan dengan besarnya dosen yang harus didorong untuk berinovasi.
- e. Pandangan PTS mahal tentu tidak selalu benar. Di PTS, tidak mungkin semua program studi bisa dijual dengan harga mahal. Dalam menentukan struktur harga biaya studi PTS, selalu memperhatikan ekologi dan eksistensi PTN yang ada di lingkungannya. Jika lingkungan PTS ternyata ada beberapa PTN dan mempunyai kesamaan program studi, maka PTS tidak mungkin menentukan biaya pendidikan prodi lebih mahal dari PTN. Ada dua alasan mengapa ini dilakukan, (1) PTN dengan *brand* yang kuat jelas berposisi beda dibanding PTS; (2) pembukaan program mandiri PTN yang nyaris tidak ada pembatasan dan tidak ada regulasi yang baik, dapat menyebabkan PTS kehilangan kesempatan untuk dipilih sebagai tempat studi. Sehingga penentuan harga PTS yang mahal justru menjadi arena bunuh diri bagi PTS. Oleh keadaan inilah yang pada akhirnya, sejumlah PTS harus menurunkan berbagai tarif biaya studi lebih rendah karena tanpa jalan ini maka PTS jelas akan ditinggalkan mahasiswa tersisa dari yang telah direkrut oleh PTN.
- f. Soal biaya akreditasi yang mahal, bukan rahasia lagi. Kini sesuai dengan regulasi, pemerintah juga membuka opsi akreditasi dilakukan oleh LAM disamping oleh BAN PT. Keberadaan LAM ini mempunyai struktur biaya yang dibebankan kepada perguruan tinggi. Saya khawatir ini menjadi ajang bisnis yang merugikan bagi perguruan tinggi. Setiap prodi. kalau mau akreditasi harus menyediakan dana Rp53 juta. Ini tidak sedikit bagi PTS. Regulasi ini menjauhkan lagi tangan pemerintah untuk ikut bertanggungjawab terhadap keberadaan PTS. Jadi menurut saya, belum saatnya akreditasi diserahkan ke LAM. Singkatnya LAM harus dibubarkan, dan akreditasinya dikembalikan ke BAN PT. Untuk menjaga mutu PTS sebenarnya cukup dengan pola pengawasan, pembinaan dan reakreditasi yang dilakukan oleh badan tunggal BAN PT saja.
- g. Pemerintah seyogyanya juga mendesain pola kolaborasi antara PTN dan PTS melalui regulasi pembagian peran di berbagai aspek. Misalnya

pembatasan rekrutmen mahasiswa baru jalur mandiri di PTN. Keadaan ini tentu bisa diperbaiki dengan cara membangun kebijakan yang lebih adil, pro PTN tetapi sekaligus juga pro PTS. Pemerintah harus hadir secara nyata dalam situasi seperti ini.

- h. PTS juga menghadapi kekurangan dosen yang berkualitas, karena untuk memberikan gaji sebagai dosen yang setara dengan PTN, tidak mudah. Perhitungan rasio dosen, kualifikasi dosen adalah sejumlah variabel yang sangat penting untuk menempatkan sebuah program studi memperoleh ijin operasi. Tetapi untuk memenuhi persyaratan dosen dengan kualifikasi, sering kali PTS juga harus menghadapi pembajakan SDM dosen, baik pembajakan itu dilakukan oleh PTN atau PTS. Maka keberadaan tunjangan profesi atau sertifikasi dosen yang selama ini telah diterapkan kepada dosen PT secara setara adalah bagian penting untuk menekan angka perpindahan dan pembajakan dosen tersebut. Tentu ini juga tidak mampu mencegah berbagai kemungkinan para dosen untuk pindah ke tempat lain. Opsi bantuan pemerintah dalam bentuk pencangkakan dosen dengan kualifikasi tinggi ke PTS, juga menjadi opsi yang penting dalam rangka mengurangi ketimpangan ketersediaan dosen PTS.

2. **Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.**, Rektor Universitas Islam Malang (Unisma) menyampaikan beberapa masukan antara lain:

- a. Terkait masalah akreditasi, kami telah menghitung secara matematis. Dalam Permendikbud, LAM dapat bersumber dari masyarakat. Di Indonesia ada 29.314 Prodi, dan semuanya pada saat di BAN PT, dibiayai oleh Kemendikbudristek per Prodi Rp30 Juta. Namun dalam ketentuan yang baru, untuk Program Profesi dokter mencapai Rp110 Juta/prodi. Vokasi sebesar Rp65,5 Juta. Vokasi Profesi sebesar Rp80 Juta. Lainnya Rp52-57,5 Juta. Biaya ini dua kali lipat dari saat di BAN. Kalau PTS banding, harus ada biaya lagi Rp29 Juta. Dana Pemerintah hanya Rp900 milyar per lima tahun. Dana tersebut sangat kecil bagi Pemerintah, namun sangat besar bagi kami. Rekomendasi kami adalah 100% akreditasi harus dibayar Pemerintah. Kalau perjuangan ini berhasil melalui Komisi X, kami tidak perlu demo di jalan-jalan.
- b. Harusnya PTN beorientasi mutu bukan kuantitas. PTN harus diorientasikan untuk memperbanyak mahasiswa S-2 dan S3. Pemerintah boleh saja membuat kompetisi. Misalnya masing-masing PT (PTN dan PTS) dikasih Rp10 milyar, lepaskan, dan biarkan mereka berkompetisi, biar bisa diketahui siapa yang mampu meningkatkan daya saingnya dengan anggaran dari pemerintah yang sama. Soal kuota bagi PTN, seharusnya ada "*one gate service*" bagi penerimaan calon mahasiswa.
- c. Dari sejumlah 4.300-an PTS dan hanya kurang dari 200 PTN, sebenarnya memiliki tugas yang sama. Harus ada kebijakan yang adil untuk keduanya. Klasterisasi biarkan tetap berlaku. Dulu ada klasterisasi PTN-PTS, namun sejak hadirnya Mendikbud baru, klasterisasi ini dihilangkan, padahal dengan adanya klasterisasi maka jelas dalam pembinaannya. Misalnya, PT *middle class* harus ada perbedaan perlakuan dan pembinaannya. Usulan kami klasterisasi tetap ada, jangan dihilangkan. Jangan ada diskriminasi antara PTN dan PTS, misalnya pada kebijakan indikator kinerja utama.
- d. Ada kebijakan terbaru, bahwa untuk pengajuan guru besar, akan melalui analisis kebijakan: kalau PTN akan dikembalikan lagi ke universitas, tapi kalau PTS akan diberikan kepada LLDIKTI. Ini lebih ruwet lagi. Untuk

- mengajukan kepangkatan saja sudah berat, tapi kenapa harus mengajukannya lagi ke LLDIKTI. Kalau bisa dipermudah dengan koridor sewajarnya, sebaiknya dipermudah. Jangan dipersulit.
- e. Dana riset kini makin turun. Ini berefek dengan akreditasi. Bagaimana bisa mengembangkan akreditasi jika dana riset makin menurun. Rekomendasi kami, dana riset harus ditambah.
3. **Dr. Munawaroh, M.Kes**, Direktur STKIP PGRI Jombang menyampaikan beberapa masukan antara lain:
- a. Kami sudah menyampaikan banyak permasalahan PTS pada 9 Desember 2022 di Komsis DPR-RI. Salah satunya mengenai dana dan konversi MBKM. Seharusnya perlu ada relaksasi dana PLP mengingat ada konversi dengan MBKM.
  - b. Mengenai LAM, kami setuju ada LAM, akan tetapi kalau berbayar, kami PTS kecil, akan kesulitan jika harus membayar Rp53 juta diluar anggaran banding Rp29 juta.
  - c. Mengenai PTN-BH boleh membuka prodi di luar kampus utama, sangat merugikan PTS setempat. Harus ada kebijakan mengenai hal ini, mengingat PTS pasti akan kalah bersaing di kota yang PTN-nya membuka Prodi disitu.
  - d. RUU Sisdiknas yang sudah beredar di masyarakat, menghilangkan tunjangan profesi. Guru dan dosen sangat gelisah, oleh karena itu perlu koreksi besar mengenai hal ini.
  - e. Dana riset turun ditengah tanggungjawab besar kami terhadap masyarakat. Bagaimana bisa mengembangkan akreditasi jika dana riset makin menurun.
4. **Pembantu Rektor Universitas Muhammadiyah Malang** menyampaikan beberapa masukan antara lain, jika jumlah PTS lebih banyak, maka jumlah lulusan PTS juga lebih banyak. Jika hal ini dihitung dalam versi daya saing, maka yang daya saingnya lemah adalah lulusan PTS. Jika PTS lemah, maka PTS-lah yang seharusnya diberikan perhatian lebih oleh pemerintah. *Image* PTN dan PTS ini penting, mengingat jika kita melihat di Eropa dan AS, yang unggul malah PTS. Kalau di Indonesia, pemanfaat lulusan PT, *image*-nya pasti akan melihat lulusan PTN daripada PTS meski akreditasinya sama-sama A. Artinya PTS tetap harus diberi perhatian.
5. **Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D. Med.Sc, Rektor Universitas Brawijaya** menyampaikan beberapa masukan antara lain:
- a. Mengenai relevansi perguruan tinggi, perlu dilihat dari kurikulum yang harus mampu bersinergi dengan kepentingan masyarakat.
  - b. Saya setuju agar fasilitas riset harus ditambah, mengingat pada beberapa tahun terakhir ada penurunan dan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Tri Dharma dan peningkatan akreditasi.
  - c. Penerimaan calon mahasiswa melalui jalur mandiri di PTN, sesungguhnya tidak menambah jumlah kuota yang sudah ditetapkan. Ini seharusnya tidak mempengaruhi penerimaan mahasiswa di PTS.
  - d. Soal pembukaan kampus PTN di luar kampus utama, awalnya adalah permintaan Pemerintah Daerah setempat. Ini kemauan Pemerintah Daerah, agar ada program pengabdian masyarakat yang terkena langsung kepada masyarakat di daerah tersebut.

6. **Pembantu Direktur Politeknik Negeri Malang** menyampaikan masukan:
  - a. Persoalan di pendidikan vokasi adalah kekurangan tenaga ahli. PTN Vokasi, jika akan meningkat menjadi PTN-BH, butuh waktu 8 tahun lebih. Tahun depan PTN Vokasi kami, diharapkan naik menjadi PTN-BH. Oleh karena itu butuh dukungan dari Komisi X DPR RI juga.
  - b. Mengenai pembukaan Prodi di luar kampus utama, awal tujuannya adalah untuk menyelamatkan aset kami di daerah. Hal ini pernah dihimbau oleh Menristekdikti periode lalu, agar aset tersebut dimanfaatkan menjadi Prodi di daerah meskipun tetap saja ada kendala beban pembukaan prodi daerah tersebut.
7. **Prof. Dr. Dyah Sawitri, Ketua LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur** sekaligus selaku **Rektor Universitas Gajayana Malang (Uniga)** menyampaikan:
  - a. LLDIKTI tidak membedakan anggaran untuk PT Vokasi dan Akademi. Padahal beban PT Vokasi lebih besar. Maka rekomendasi kami adalah memberikan pendanaan khusus bagi PT Vokasi sesuai dengan kekhususannya.
  - b. Masalah dalam pelaksanaan Tri Dharma, sebagaimana dikeluhkan adalah penurunan anggaran riset dan pengabdian. Pada 2021 dana hibah turun dari Rp10,7 Milyar menjadi Rp7,6 Milyar. Dana riset, dari Rp80,8 Milyar menjadi Rp67 Milyar. Penurunan ini akibat Covid-19. Oleh karena itu pasca Covid-19, anggaran ini mestinya dinaikkan kembali. Kami memohon agar kenaikan anggaran ini, dikawal.
  - c. Beberapa PT dari Jawa Timur telah mengajukan dana bantuan LAM, oleh karena itu mohon kepada Komisi X DPR RI juga mengawal tentang ajuan dana bantuan LAM yang telah diajukan oleh beberapa PT di Jawa Timur.
  - d. MBKM menurut kami baik, dan tetap perlu ada sinergi dengan DUDI, membentuk insan cendikia (*know how*), dan lain-lain. Namun sosialisasinya harus diperbaiki agar tepat sasaran. Sesuai dengan "matching fund".
  - e. Mengenai jabatan fungsional dosen, kami sudah ada aturan yang baru yang mengurangi prosesnya, misalnya mengurangi jumlah pengujinya. Pelaksanaannya bisa luring maupun daring. Memang ada syarat khusus yang harus dipenuhi untuk guru besar, agar tidak ada kesalahan. Kebijakan ini memang perlu sosialisasi.
8. Komisi X DPR RI melalui **Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si, An'im Falachuddin Mahrus, dan Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP**, menyampaikan pandangan antara lain sebagai berikut:
  - a. Mengapresiasi masukan dari para pemangku kepentingan perguruan tinggi yang hadir di Unmer Malang. Masukannya akan menjadi rekomendasi Panja Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.
  - b. Komisi X DPR RI memiliki niat untuk mengurangi beban PTS. PTS diizinkan hadir, seharusnya dikawal agar dapat mengemban tugas meningkatkan APK. Anggaran PTS yang kecil perlu ditingkatkan.
  - c. Semangat mem-PTN-BH kan PTN saat ini ibarat mengurangi peran negara dan memperkuat peran masyarakat. Ini ibarat privatisasi. Harusnya anggaran tetap dari pemerintah, meskipun peran masyarakat diperkuat.
  - d. Pada postur APBN 2023, anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp612,2 T harus dibagi-bagi, dan sekitar 13% dari anggaran tersebut atau sekitar Rp80,22 T berada di Kemdikbudristek. Untuk tahun 2023 nanti anggaran KIP naik namun PIP turun.

### III. KESIMPULAN

1. Beberapa tanggapan dari Pimpinan PTS, menyebutkan bahwa kondisi PTS sebenarnya tergantung kepada peran pemerintah sebagai mitra bagi PTS dalam mengemban fungsi menyelenggarakan pendidikan tinggi. Sebagai mitra, kehadiran pemerintah sangat didambakan PTS untuk membuat dan mengontrol regulasi yang adil. Tantangan yang dihadapi PTS sebenarnya jauh lebih berat, karena di satu sisi ingin menyelenggarakan proses pendidikan yang lebih baik, tetapi di sisi lain juga tersandung dengan regulasi yang kurang menguntungkan. Beberapa regulasi yang perlu dievaluasi antara lain:
  - a. Penerimaan Calon Mahasiswa Baru secara Mandiri, yang dinilai akan menggerus calon mahasiswa yang seharusnya masuk PTS.
  - b. Pengembangan Prodi PTN di luar kampus utama, yang dinilai akan mematikan PTS setempat karena kalah bersaing.
  - c. Biaya akreditasi melalui LAMPT yang dinilai sangat memberatkan, sehingga pembiayaan akreditasi tersebut harus 100% ditanggung pemerintah.
  - d. Program studi di PTS akreditasinya turun dari B ke C, yang seharusnya ada pembinaan terlebih dahulu sebelum LAMPT atau BANPT menurunkan akreditasinya.
  - e. Pembajakan dosen PTS yang sering terjadi, dimana dosen PTS yang telah selesai mengambil studi, justru berpindah ke PTN. Hal tersebut merugikan PTS.
  - f. Pengajuan guru besar di PTS melalui LLDIKTI dianggap menyulitkan, yang seharusnya bisa dipermudah.
  - g. Penurunan anggaran/dana hibah dan dana riset sangat berpengaruh terhadap upaya peningkatan syarat akreditasi, daya saing dan mengurangi peran terhadap masyarakat.
2. Tanggapan PTN, yang disampaikan oleh Pimpinan Universitas Brawijaya dan Politeknik Negeri Malang, antara lain sebagai berikut:
  - a. Terkait penerimaan mahasiswa mandiri, sebenarnya tidak merubah kuota yang telah ditetapkan. Penerimaan mandiri ini seharusnya tidak menggerus peminat PTS, karena kuota mahasiswa tidak pernah bertambah.
  - b. Pembukaan Prodi di luar kampus utama, merupakan kebijakan yang diawali dari usulan Pemerintah Daerah. Selain itu, juga merupakan bentuk pemanfaatan aset PTN di wilayah/daerah lain, sehingga dihimbau untuk membuka prodi di tempat tersebut. Pembukaan prodi ini juga tidak mudah.
  - c. Fasilitas riset harus ditambah, mengingat pada beberapa tahun terakhir ada penurunan dan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Tri Dharma dan peningkatan akreditasi.
  - d. Persoalan di pendidikan vokasi adalah kekurangan tenaga ahli. PTN Vokasi, jika akan meningkat menjadi PTN-BH, butuh waktu 8 tahun lebih. Tahun depan PTN Vokasi Politeknik Negeri Malang, diharapkan naik menjadi PTN-BH sehingga perlu dukungan.
3. Tanggapan pemerintah, yang diwakili LLDIKTI Jawa Timur, antara lain sebagai berikut:
  - a. LLDIKTI tidak membedakan anggaran untuk PT Vokasi dan Akademi, sehingga merekomendasikan pendanaan khusus bagi PT Vokasi sesuai dengan kekhususannya.

- b. Untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma PT, anggaran pengabdian masyarakat dan anggaran riset mesti dinaikkan kembali sebagaimana sebelum Covid-19.
- c. Beberapa PT dari Jawa Timur telah mengajukan dana bantuan untuk peningkatan akreditasi melalui LAMPT.
- d. MBKM perlu sinergi dengan DUDI, membentuk insan cendikia (*know how*), dan lain-lain, dengan dukungan sosialisasi yang baik agar tepat sasaran.
- e. Telah ada aturan baru mengenai jabatan fungsional dosen yang dinilai lebih meringankan, namun perlu disosialisasikan kembali.

#### **IV. REKOMENDASI**

Kemendikbudristek RI perlu melakukan evaluasi kebijakan yang dapat mendukung perkembangan pelaksanaan pendidikan tinggi, diantaranya:

1. Evaluasi terhadap ijin pembukaan PTN diluar kampus utama dan perekrutan mahasiswa jalur mandiri, yang dapat berimplikasi pada persaingan penyelenggaraan pendidikan tinggi antara PTN dengan PTS.
2. Evaluasi besaran biaya akreditasi dengan mempertimbangkan alternatif pembiayaan akreditasi sepenuhnya agar dapat dibiayai oleh pemerintah.
3. Mengembalikan kenaikan anggaran/dana hibah dan riset yang mengalami penurunan akibat *recovery* pandemi, sehingga berpengaruh terhadap upaya peningkatan syarat akreditasi dan daya saing oleh perguruan tinggi.

#### **V. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Jawa Timur, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

Jakarta, 2 Oktober 2022

**Ketua Tim/  
Anggota Komsis X DPR RI.**

Ttd.

**Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si.  
A-507**